

Acronym	Bahasa	English
P4KSI	Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan	Research Centre for Fishery Management and Conservation of Fishery Resources
BPPL	Balai Penelitian Perikanan Laut	Marine Research Agency
KOMNAS KAJISKAN	Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan	National Committee on Fish Stock Assessment
SDI	Sumberdaya ikan	Fishery Resources
PUP	Pelayanan Usaha Perikanan	Fishing Services
KKJI	Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Fish and Area Conservation
PSDP	Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Surveillance of Fishery Resources
PLN	Pemasaran Luar Negeri	Foreign Marketing
PDN	Pemasaran Dalam Negeri	Domestic Marketing
KTI	Komisi Tuna Indonesia	Indonesian Tuna Commission
KEMLU	Kementerian Luar Negeri	Ministry of Foreign Affairs
PUSKITA	Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga	Centre for Analysis on International Cooperation and Inter Institution
BBRSE	Balai Besar Riset Sosial dan Ekonomi	Research Agency on Social and Economy
ASTUIN	Asosiasi Tuna Indonesia	Indonesian Tuna Association
ATLI	Asosiasi Tuna Longline Indonesia	Indonesian Tuna Longline Association
BPSDM KP	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	Marine and Fisheries Human Resources Development Agency
KAPI	Kapal dan Alat Penangkap Ikan	Vessel and Fishing Gear
Setkab	Sekretariat Kabinet	Cabinet Secretary
FKPPS	Forum Komunikasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya ikan	Forum on Fishery Resources Utilization Management
LRP	Titik Batas Referensi	Limit Reference Point
HCR	Aturan Penangkapan	Harvest Control Rule
ETP	Endangered, Terancam, Dilindungi	Endangered, Threatened, Protected
NPOA	Rencana Aksi Nasional	National Plan of Action
BMP	Praktek Pengelolaan yang Baik	Better Management Practices

<p>2.1.1 The UoA aims to maintain primary species above the point where recruitment would be impaired (PRI) and does not hinder recovery of primary species if they are below the PRI.</p>	<p>Belum ada informasi mengenai status stok untuk spesies primer, sehingga belum ada peraturan yang memastikan terjadinya mekanisme recovery jika spesies ini mengalami overexploited.</p> <p>Belum tersedianya informasi mengenai status stok untuk spesies primer, sehingga belum ada langkah pengaturan yang menjaga agar spesies ini tidak mengalami overexploited.</p> <p>Perlu ada pengkajian menggunakan mekanisme Risk Based Framework (RBF) untuk status hasil tangkapan spesies primer ini</p>	<p>Melakukan pendugaan stok untuk spesies primer dari penangkapan udang di Perairan Pulau Kotabaru dan sekitarnya</p>	<p>Tersedianya status pendugaan stok menggunakan RBF (PSA) untuk spesies primer</p>	<p>Melakukan kajian biologis dari spesies primer di Perairan Pulau Kotabaru dan sekitarnya</p>	<p>Tersedianya informasi mengenai produktivitas spesies primer (rerata umur saat matang gonad, rerata ukuran pada saat matang gonad, rerata umur maksimal, rerata ukuran maksimal, fekunditas, strategi reproduksi, tropik level) serta kerentanan /susceptabilitas spesies primer (areal overlap, vertikal overlap, selektivitas, kematian pasca penangkapan)</p>	<p>LC EAFM, Nelayan</p>																	
<p>2.1.2 There is a strategy in place that is designed to maintain or to not hinder rebuilding of primary species, and the UoA regularly reviews and implements measures, as appropriate, to minimise the mortality of unwanted catch.</p>	<p>Belum ada strategi pengelolaan, evaluasi strategi pengelolaan dan penerapan strategi pengelolaan untuk spesies primer belum tersedia.</p>		<p>Membuat strategi pemanfaatan untuk spesies primer tangkapan udang</p>	<p>Tersedianya strategi pengelolaan spesies primer yang memastikan agar pemanfaatannya berada dalam batas yang diperbolehkan secara biologis</p>	<p>melakukan kajian akademis untuk pembuatan strategi pengelolaan spesies primer</p>	<p>tersedianya kajian akademis untuk pembuatan strategi pengelolaan spesies primer yang meliputi strategi evaluasi dan pelaksanaan</p>	<p>LC EAFM, DPK Kab, WWF, PT, Sekar LAut, Nelayan</p>																
<p></p>	<p></p>	<p>Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies primer di tingkat nelayan</p>		<p>peraturan pengelolaan spesies primer didukung oleh nelayan</p>	<p>LC EAFM, DPK Kab, WWF, PT, Sekar LAut, Nelayan</p>																		
<p></p>	<p></p>	<p>Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies primer di tingkat kabupaten / kota</p>		<p>draft mendapat persetujuan di tingkat kabupaten / kota</p>	<p>LC EAFM, DPK Kab, WWF, PT, Sekar LAut, Nelayan</p>																		
<p></p>	<p></p>	<p>Mendorong terbentuknya peraturan di tingkat kabupaten terkait dengan pengelolaan spesies primer</p>		<p>Tersedianya peraturan yang mendukung pengelolaan perikanan spesies primer</p>	<p>LC EAFM, DPK Kab, WWF, PT, Sekar LAut, Nelayan</p>																		
<p>2.1.3 Information on the nature and amount of primary species taken is adequate to determine the risk posed by the UoA and the effectiveness of the strategy to</p>	<p>Belum adanya informasi mengenai sifat dan status spesies non-target efektif sebagai bagian dari strategi yang digunakan dalam mengelola</p>	<p>Melakukan penelitian mengenai spesies primer penangkapan udang</p>	<p>Tersedianya informasi yang memadai mengenai spesies primer yang meliputi komposisi spesies tangkapan (pencatatan, komposisi spesies, hasil tangkapan)</p>	<p>membuat protokol pengumpulan data</p>	<p>tersedianya protokol pengumpulan data</p>	<p>LC EAFM, WWF, PT, Sekar LAut, Nelayan</p>																	
<p></p>	<p></p>		<p>dilakukannya aktivitas pengumpulan data secara reguler</p>	<p>tersedia data yang sudah dianalisis secara ilmiah</p>	<p>LC EAFM</p>																		

<p>2.5.2 There are measures in place to ensure the UoA does not pose a risk of serious or irreversible harm to ecosystem structure and function.</p>	<p>Terdapat peraturan yang menyatakan bahwa perlindungan ekosistem dapat dilakukan jika aktivitas penangkapan kerapu berpotensi mengganggu fungsi ekosistem</p> <p>Desain strategi pengelolaan mempertimbangkan perlunya langkah pengelolaan yang memperhitungkan pengaruh aktivitas penangkapan terhadap ekosistem.</p> <p>Langkah pengelolaan ketika diimplementasikan sesuai dengan amanat PP 60 tahun 2007 dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Masih ditemukan adanya aktivitas penangkapan udang yang berukuran belum layak tangkap dengan menggunakan Jaringan Gondrong sehingga dapat mengganggu fungsi ekosistem</p>		<p>Membuat strategi pengelolaan untuk ekosistem serta mendorong penguatan pemantauan kawasan perlindungan laut</p>	<p>- Tersedianya strategi pengelolaan ekosistem yang memastikan agar aktivitas pemanfaatan spesies udang target berdampak minimal terhadap ekosistem</p>	<p>Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan ekosistem dan zonasi kawasan perlindungan laut di tingkat nelayan</p>	<p>peraturan pengelolaan ekosistem dan zonasi kawasan perlindungan laut didukung oleh nelayan</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut, Nelayan</p>																															
<p>2.5.3 There is adequate knowledge of the impacts of the UoA on the ecosystem</p>	<p>Ketersediaan data ekosistem belum cukup memberikan informasi mengenai struktur dan fungsi trophik, komposisi komunitas, keanekaragaman dan pola produktivitas ekosistem.</p> <p>Pengaruh aktivitas penangkapan ikan kerapu terhadap elemen ekosistem belum dikaji.</p> <p>Pemahaman terhadap fungsi komposisi ekosistem belum diketahui</p> <p>Relevansi informasi terhadap komponen dan elemen ekosistem belum diketahui.</p> <p>Pemantauan belum mencukupi untuk</p>		<p>melakukan kajian untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak pemanfaatan spesies udang target terhadap ekosistem</p>	<p>Tersedianya hasil kajian yang meliputi dampak pemanfaatan spesies target terhadap elemen ekosistem kunci (mangsa utama, predator, kompetitor, komposisi komunitas) yang didasarkan atas pengumpulan data secara periodik</p>	<p>melakukan kajian pengumpulan data yang dilakukan secara periodik</p>	<p>tersedianya laporan ilmiah yang meliputi dampak pemanfaatan spesies target terhadap elemen ekosistem kunci (mangsa utama, predator, kompetitor, komposisi komunitas) setiap 2 tahun</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut, Nelayan</p>																															
<p>3.1.1 The management system exists within an appropriate and effective legal and/or customary framework which ensures that it: - Is capable of delivering sustainability in the UoA(s) - Observes the legal rights created</p>	<p>KKP mengelola perikanan yang memiliki kapal > 30 GT dan daerah tangkapan antara 12-200 mil. Daerah operasi hingga 4 mil dan menggunakan kapal dibawah 5 GT untuk penangkapan ikan karang dikelola oleh DKP Projinsi. Hal yang perlu dipikirkan</p>		<p>melakukan kajian untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak pemanfaatan spesies udang target terhadap ekosistem</p>	<p>Tersedianya hasil kajian yang meliputi dampak pemanfaatan spesies target terhadap elemen ekosistem kunci (mangsa utama, predator, kompetitor, komposisi komunitas) yang didasarkan atas pengumpulan data</p>	<p>mereview peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan perikanan berdasarkan prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>teridentifikasi peraturan perundangan yang mendukung serta rekomendasi perlunya peraturan perundangan yang belum memenuhi prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut</p>																															

I
s
t
r
e
p
o
r
t

<p>explicitly or established by custom of people dependent on fishing for food or livelihood; and - Incorporates an appropriate dispute resolution framework</p>	<p>adalah belum adanya rencana pengelolaan untuk perikanan karang sesuai amanat UU 31 th 2004, meskipun saat ini sedang dibangun strategi pengelolaan perikanan karang.</p>		<p>secara periodik</p>	<p>Membuat naskah akademis untuk peraturan pengelolaan yang mendukung prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>Tersedianya naskah akademis yang meliputi pengelolaan kolaboratif perikanan, mekanisme yang transparan untuk penyelesaian sengketa berdasarkan hukum, mengakui pengelolaan perikanan berbasis adat dan kesepakatan masyarakat yang mendukung keberlanjutan sumberdaya</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut</p>																	
				<p>Melakukan konsultasi nasional untuk mendorong tersedianya peraturan pengelolaan perikanan yang mendukung prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>terdapatnya rekomendasi untuk mengadopsi peraturan pengelolaan perikanan yang mendukung prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut</p>																	
<p>3.1.2 The management system has effective consultation processes that are open to interested and affected parties. The roles and responsibilities of organisations and individuals who are involved in the management process are clear and understood by all relevant parties.</p>	<p>Belum ditetapkan organisasi dan individu yang terlibat dalam proses manajemen. Fungsi, peran dan tanggung jawab secara eksplisit sudah didefinisikan dan dipahami dengan baik untuk bidang utama tanggung jawab dan interaksi. Belum adanya informasi terkait sistem manajemen yang mencakup proses konsultasi yang secara teratur mencari dan menerima informasi yang relevan, termasuk pengetahuan lokal. Belum adanya informasi terkait proses konsultasi yang memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan dan berpengaruh untuk terlibat.</p>		<p>Mendorong organisasi terwujudnya skema pengelolaan yang memiliki proses konsultasi yang efektif dan terbuka untuk seluruh stakeholder</p>	<p>- stakeholder yang terlibat dalam proses pengelolaan perikanan teridentifikasi dan mengetahui peran serta tanggung jawabnya - secara reguler mencari dan menerima informasi yang relevan terhadap pengelolaan - proses konsultasi terhadap pengelolaan perikanan memberikan kesempatan terhadap semua stakeholder untuk terlibat</p>	<p>Mendorong penguatan kapasitas kelompok dalam skema pengelolaan</p>	<p>Terwujudnya skema pengelolaan perikanan selain pemantauan kawasan pemanfaatan dari kelompok nelayan penangkap udang di Kepulauan Kalimantan Selatan</p>	<p>WWF Indonesia</p>																
					<p>Mendorong terbentuknya lembaga pengelola udang di Kalimantan Selatan dan sekitarnya</p>	<p>Terbentuknya Lembaga pengelola udang di Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang memimpin dalam pelaksanaan peraturan yang terdapat pada perbaikan prinsip 1 dan 2 MSC, yang terdiri dari kordinator independen, perwakilan dari DKP Kab / kabupaten, perwakilan Industri, nelayan, peneliti perikanan, spesialis alat tangkap, LSM yang bergerak di bidang lingkungan, anggota POKMASWAS yang melakukan pertemuan secara reguler dan terbuka terhadap keterlibatan stakeholder terkait</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut</p>																

<p>3.1.3 The management policy has clear long-term objectives to guide decisionmaking that are consistent with MSC fisheries standard, and incorporates the precautionary approach.</p>	<p>Tersedia informasi serta regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang keberlanjutan spesies, ekosistem, habitat serta rencana-rencana strategis jangka panjang untuk mengatur hal-hal tersebut</p>		<p>Mendorong terwujudnya tujuan jangka panjang yang selaras dengan prinsip MSC dan pendekatan kehati-hatian</p>	<p>Tersedia peraturan pengelolaan yang mendukung prinsip MSC dan pendekatan kehati-hatian</p>	<p>lihat 1.2.2</p>	<p>n/a</p>										
<p>3.2.1 The fishery specific management system has clear, specific objectives designed to achieve the outcomes expressed by MSC's Principles 1 and 2.</p>	<p>Belum adanya informasi mengenai tujuan jangka pendek dan panjang, yang konsisten dengan pencapaian hasil diungkapkan oleh MSC Prinsip 1 dan 2 dari praktek perikanan udang secara khusus di perairan kepulauan Kalimantan Selatan dan sekitarnya</p>		<p>Mendorong terwujudnya tujuan pengelolaan perikanan udang yang selaras dengan prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>Tersedia sistem pengelolaan yang memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang selaras dengan prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>lihat 1.2.2</p>	<p>n/a</p>										
<p>3.2.2 The fishery-specific management system includes effective decision-making processes that result in measures and strategies to achieve the objectives and has an appropriate approach to actual disputes in the fishery under assessment.</p>	<p>Belum adanya mekanisme proses untuk mencapai tujuan perikanan spesifik. Belum adanya mekanisme proses pengambilan keputusan yang menanggapi isu-isu penting serius dan lain yang diidentifikasi dalam penelitian yang relevan, monitoring, evaluasi dan konsultasi, dalam cara yang tepat waktu dan adaptif transparan dan memperhitungkan implikasi yang lebih luas</p>		<p>Mendorong terwujudnya proses pengambilan keputusan yang dapat menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan perikanan terkait</p>	<p>- Tersedia proses pengambilan keputusan yang mendukung terwujudnya tujuan pada pengelolaan perikanan udang, mengkomodasi isu yang teridentifikasi dari hasil penelitian, pemantauan, evaluasi serta konsultasi secara cepat dan menggunakan prinsip kehati-hatian - Tersedia informasi mengenai pengelolaan dan performa aktivitas perikanan untuk khalayak umum - Tersedia sistem pengelolaan yang mematuhi peraturan dan secara cepat</p>	<p>Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies udang target di tingkat nelayan</p>	<p>peraturan pengelolaan spesies udang target yang didukung oleh nelayan dan di dalamnya meliputi adanya: (1) proses pengambilan keputusan untuk pembuatan strategi dan langkah dalam mencapai tujuan pengelolaan udang berkelanjutan, (2) responsif terhadap isu yang teridentifikasi dari hasil penelitian, pemantauan, evaluasi serta konsultasi secara cepat dan transparan, (3) menggunakan prinsip kehati-hatian, (4) tersedia untuk khalayak umum, serta (5) mematuhi peraturan dan secara cepat merespon terhadap kemungkinan gugatan hukum</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut</p>									

	<p>Belum terbentuknya proses pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan kehati-hatian dan didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.</p> <p>Belum adanya informasi tentang kinerja perikanan dan tindakan manajemen yang tersedia berdasarkan permintaan, dan penjelasan yang diberikan untuk setiap tindakan atau kurangnya tindakan yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang relevan yang muncul dari penelitian, pemantauan dan evaluasi kegiatan ulasan.</p> <p>Belum adanya sistem manajemen yang berupaya untuk memenuhi secara tepat waktu dengan keputusan pengadilan yang timbul dari tantangan hukum</p>		<p>merespon terhadap kemungkinan gugatan hukum</p>	<p>Melaksanakan konsultasi draft peraturan pengelolaan spesies udang target di tingkat kabupaten / Kota</p>	<p>draft yang didukung oleh pemerintah kabupaten/kota dan di dalamnya meliputi adanya: (1) proses pengambilan keputusan untuk pembuatan strategi dan langkah dalam mencapai tujuan pengelolaan udang berkelanjutan, (2) responsif terhadap isu yang teridentifikasi dari hasil penelitian, pemantauan, evaluasi serta konsultasi secara cepat dan transparan, (3) menggunakan prinsip kehati-hatian, (4) tersedia untuk khalayak umum, serta (5) mematuhi peraturan dan secara cepat merespon terhadap kemungkinan gugatan hukum</p>	<p>LC EAFM, DKP Kab, WWF Indonesia, Nelayan</p>																	
				<p>Mendorong terbentuknya peraturan di tingkat kabupaten terkait dengan pengelolaan udang</p>	<p>Tersedianya peraturan di tingkat kabupaten yang mendukung pengelolaan perikanan udang target dan di dalamnya meliputi adanya: (1) proses pengambilan keputusan untuk pembuatan strategi dan langkah dalam mencapai tujuan pengelolaan udang berkelanjutan, (2) responsif terhadap isu yang teridentifikasi dari hasil penelitian, pemantauan, evaluasi serta konsultasi secara cepat dan transparan, (3) menggunakan prinsip kehati-hatian, (4) tersedia untuk khalayak umum, serta (5) mematuhi peraturan dan secara cepat merespon terhadap kemungkinan gugatan hukum</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut, DKP. Kab.</p>																	
<p>3.2.3 Monitoring, control Monitoring, control and surveillance mechanisms ensure the management measures in the fishery are enforced and complied with.</p>	<p>Belum terbangunnya skema pengawasan, pemantauan dan pengaturan di lokasi penangkapan dari nelayan yang berada di Pulau Kotabaru dan sekitarnya yang tercantum dalam PERDA tentang Daerah pemanfaatan.</p>	<p>Mendorongkan terwujudnya mekanisme pemantauan, pengaturan dan pengawasan (MCS) dan dilaksanakan dengan baik</p>	<p>- Tersedianya sistem MCS, dan sanksi terhadap pelanggaran diimplementasikan - Tersedianya bukti bahwa nelayan mematuhi sistem pengelolaan yang ada</p>	<p>Mendorong terbentuknya POKMASWAS di tingkat kabupaten / kota</p>	<p>terbentuknya POKMASWAS di tingkat kabupaten/kota yang memiliki skema pemantauan, pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan udang serta dibekali dengan kewenangan untuk penegakan peraturan pengelolaan</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut, DKP. Kab.</p>																	
				<p>Melakukan sosialisasi peraturan pengelolaan udang berkelanjutan kepada stakeholder udang</p>	<p>terlaksananya sosialisasi peraturan pengelolaan udang berkelanjutan serta sanksi bagi pelanggar peraturan kepada stakeholder udang</p>	<p>LC EAFM, WWF Indonesia, PT. Sekar LAut, DKP. Kab.</p>																	

<p>3.2.4 There is a system for monitoring and evaluating the performance of the fishery specific management system against its objectives. There is effective and timely review of the fishery specific management system.</p>	<p>Belum adanya informasi terkait mekanisme perikanan yang mengevaluasi bagian penting dari sistem manajemen. Belum adanya sistem pengelolaan perikanan spesifik yang tuntut pada review internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala.</p>		<p>Mendorongkan terwujudnya rencana penelitian yang dibutuhkan dalam pengelolaan perikanan udang</p>	<p>- Tersedianya rencana penelitian yang memberikan informasi strategis dan dapat dipercaya serta secara reguler untuk pengelolaan yang selaras dengan prinsip 1 dan 2 MSC - Hasil kajian ilmiah diseminasikan secara reguler kepada stakeholder terkait</p>	<p>mendorongkan tersedianya rencana penelitian untuk keberlanjutan sumberdaya udang</p>	<p>Tersedianya rencana penelitian yang dilakukan secara terstruktur dan terjadwal untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip 1 dan 2 MSC</p>	<p>LC EAFM, BPPL, WWF Nasional, WWF Indonesia</p>																	
					<p>Mendorongkan adanya diseminasi hasil kajian ilmiah kepada stakeholder secara reguler</p>	<p>Tersedianya proceeding kajian ilmiah mengenai perikanan udang</p>	<p>LC EAFM, BPPL, WWF Nasional, WWF Indonesia</p>																	

NOTES:

1. Insert or delete issues according to the needs of your action plan.
2. Insert or delete lines and numbers (1-1, 1-2, etc) according to the needs of your plan.
3. Denote H, M, or L priority by colouring relevant boxes under the Performance Indicator:
4. Cross-reference each action to as many corresponding Performance Indicators as are relevant in your action plan.
5. Assumption is that 'client organisation' in this hypothetical case is a fishery group (e.g., a fisher's association; industry group; or fishery community association)